

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH
MINIMUM, PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI, DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Nama : Putri Kawasaki
Nomor Mahasiswa : 20313358
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2024**

HALAMAN JUDUL

Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Upah Minimum Regional, Penanaman Modal Asing,
Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di
Provinsi Jawa Tengah

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
Guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh

Nama	: Putri Kawasaki
Nomor Mahasiswa	: 20313358
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2023

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FBE UII, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan jujur dan tidak mengandung bukti plagiarisme. Saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan pernyataan yang berlaku apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar.

Yogyakarta, 28 Agustus 2024

Penulis



PUTRI KAWASAKI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

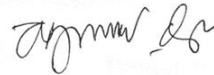
Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana
jenjang Strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Nama : Putri Kawasaki
Nomor Mahasiswa : 20313358
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Agustus 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Prof. Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Disusun oleh : PUTRI KAWASAKI

Nomor Mahasiswa : 20313358

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 12 September 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D

Penguji : Prastowo, SE., M.Ec.Dev.



Mengetahui
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA
Muhammad Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



MOTTO

Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita (QS. At Taubah [9] : 40)

Di segala kesusahan yang ada dihidup ini, pasti selalu ada jalan keluar yang terpenting kita selalu berusaha mencari jalan itu (Mamah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur, peneliti memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, ridha, dan karunia-Nya, serta atas kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan sehingga skripsi ini dipersembahkan oleh peneliti kepada:

1. Mamah tercinta, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, motivasi serta dukungan baik secara moril maupun materiil yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Adik-adik, Inova Kawasaki dan Kauri Kawasaki, yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa, yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman terdekat yang selalu memberikan masukan, bantuan, serta dukungan yang sangat berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT' atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Upah Minimum Regional, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022”. Dalam kesempatan yang penuh rasa hormat ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada mereka:

1. Kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Yth. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Ec., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Yth. Bapak Abdul Hakim S.E., M.Ec., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Yth. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mendampingi penulis selama masa penyusunan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dengan penuh cinta dan penghormatan, penulis mempersembahkan karya ini kepada Mamah tercinta, Ibu Arnia Saryati, sebagai bentuk penghargaan yang mendalam atas kasih sayang, dukungan, dan cinta yang tidak terhingga. Terima kasih atas segala motivasi, doa, dan nasihat yang selalu menguatkan penulis.
6. Kepada saudara kandung tercinta, Inova Kawasaki dan Kauri Kawasaki, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kritik yang kalian berikan kepada penulis.
7. Kepada Kakek dan Nenek, yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar tidak mudah menyerah dan selalu meyakinkan penulis.
8. Untuk Genta Pranaja, yang selalu menghibur penulis disaat penulis dalam keadaan jenuh saat mengerjakan skripsi.
9. Untuk teman seperjuangan, Fatikah Desi Anggraeni, yang selalu memberikan semangat, mendengarkan segala keluh kesah, dan menemani penulis dalam setiap langkah.

10. Untuk Diva Amelinda Maharani dan Devita Salsabila Utami, yang kostnya selalu menjadi tempat terbuka bagi penulis, terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Kepada Ananda Putri Muslimah dan Fadella Devintasari, terima kasih atas semangat, motivasi, tempat berbagi cerita, dan hiburan yang kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, masih terdapat kekurangan yang mungkin tidak dapat dihindari. Namun demikian, penulis tetap ingin menyampaikan terima kasih dan berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak yang terlibat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Putri Kawasaki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	iii
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Penyerapan Tenaga Kerja	13
2.2.2 Tenaga Kerja	13
2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto	14

2.2.4	Upah Minimum	14
2.2.5	Penanaman Modal Asing (PMA)	15
2.2.6	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	15
2.2.7	Belanja Pemerintah	15
2.3	Hubungan Antar Variabel	15
2.3.1	Hubungan antara PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	16
2.3.2	Hubungan antara Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	16
2.3.3	Hubungan antara PMA terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	16
2.3.4	Hubungan antara PMDN terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	17
2.3.5	Hubungan antara Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	17
2.4	Kerangka Pemikiran	17
2.5	Formulasi Hipotesis.....	18
BAB III.....		19
METODE PENELITIAN		19
3.1	Jenis dan Sumber Pengumpulan Data	19
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	19
3.2.1	Penyerapan Tenaga Kerja	19
3.2.2	PDRB.....	19
3.2.3	Upah Minimum	19
3.2.4	PMA	19
3.2.5	PMNDN.....	20
3.2.6	Belanja Pemerintah	20
3.2.7	Coronavirus Direase 2019 (Covid-19).....	20
3.3	Metode Analisis Penelitian	20
3.4	Estimasi Regresi Data Panel.....	21
3.4.1	Common Effect Models (CEM)	21
3.4.2	Fixed Effect Models (FEM)	21
3.4.3	Random Effect Models (REM).....	22

3.5	Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel	23
3.5.1	Uji Chow.....	23
3.5.2	Uji Lagrange Multiplier.....	23
3.5.3	Uji Hausman	23
3.6	Pengujian Statistik.....	24
3.6.1	Koefisien Determinasi.....	24
3.6.2	Uji F-Statistik (Kelayakan Model).....	24
3.6.3	Uji t-statistik (Uji Parsial)	24
BAB IV.....		26
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		26
4.1	Deskripsi Data Penelitian	26
4.1.1	Penyerapan Tenaga Kerja	26
4.1.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	27
4.1.3	Upah Minimum	27
4.1.4	Penanaman Modal Asing (PMA)	27
4.1.5	Penanaman Modal Dalam Negeri.....	27
4.1.6	Belanja Pemerintah	27
4.1.7	Dummy (Covid-19).....	28
4.2	Hasil Estimasi.....	28
4.2.1	Model Common Effect	28
4.2.2	Model Fixed Effect.....	29
4.2.3	Model Random Effect.....	29
4.3	Pemilihan Model.....	30
4.3.1	Uji Chow.....	30
4.3.2	Uji Lagrange Multiplier.....	31
4.3.3	Uji Hausman	32
4.4	Evaluasi Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Models (FEM)</i>	32
4.5	Pengujian Hipotesis	33

4.5.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	33
4.5.2	Uji Kelayakan Model (Uji F).....	33
4.5.3	Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji T).....	33
4.6	Pembahasan Hasil.....	35
4.6.1	Analisis Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	35
4.6.2	Analisis Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	35
4.6.3	Analisis Pengaruh PMA terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	36
4.6.4	Analisis Pengaruh PMDN terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	36
4.6.5	Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	36
4.6.6	Analisis Pengaruh Dummy (Covid 19) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	36
BAB V		38
PENUTUP		38
5.1	Simpulan.....	38
5.2	Implikasi.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....		41
LAMPIRAN		43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2
Gambar 1. 2 Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja (Jiwa)	3
Gambar 1. 3 Laju PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)	4
Gambar 1. 4 Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah (Ribuan Rupiah)	5
Gambar 1. 1 Total PMA, PMDN dan Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja.....	6

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	26
Tabel 4. 2 Hasil Regresi Model Common Effect	28
Tabel 4. 3 Hasil Regresi Model Fixed Effect	29
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Model Random Effect.....	30
Tabel 4. 5 Hasil Data Uji Chow.....	31
Tabel 4. 6 Lagrange Multiplier	31
Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman	32
Tabel 4. 8 Estimasi Uji Regresi Fixed Effect Model.....	32
Tabel 4. 9 Hasil Uji T	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Data Jumlah Tenaga Kerja, Nilai PDRB, UMR, Jumlah PMA, Jumlah PMDN, Total Belanja Pemerintah dan Variabel Dummy.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1. 2 Common Effect Model	46
Lampiran 1. 3 Fixed Effect Model	47
Lampiran 1. 4 Random Effect Model.....	48
Lampiran 1. 5 Uji Chow.....	49
Lampiran 1. 6 Uji Lagrange Multiplier.....	50
Lampiran 1. 7 Uji Hausman	51

ABSTRAK

Penyerapan tenaga kerja masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang lebih cenderung menggunakan dan mengalihkan investasi ke pada modal daripada padat karya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Regional, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, serta Belanja Pemerintah terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang disimpulkan dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), yang mencakup periode tahun 2017 hingga 2022. Metodologi yang diterapkan adalah analisis regresi data panel, yang mengintegrasikan data cross-section dengan time series, dan diolah menggunakan perangkat lunak E-views 12.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Regional, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Secara parsial, variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Regional, dan Penanaman Modal Asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya, variabel Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Variabel Covid-19 juga menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Regional, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Pemerintah dan Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

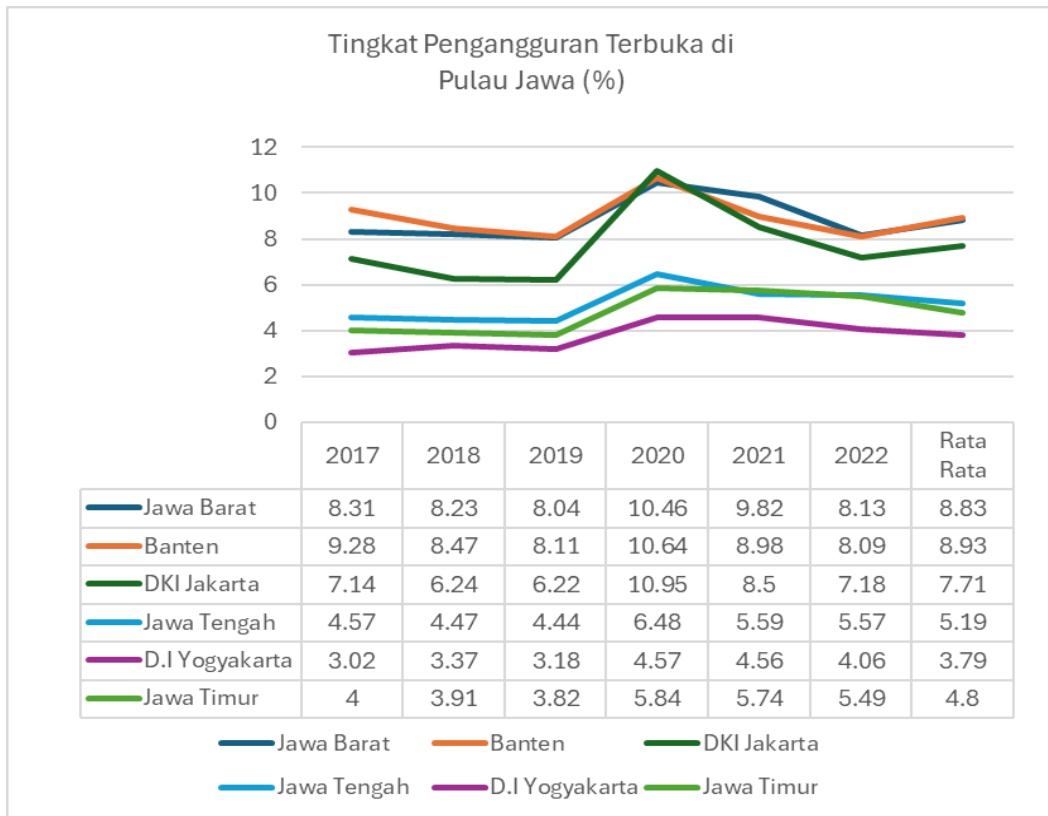
1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait ketenagakerjaan dan masalah ketersediaan lapangan kerja, yang belum sepenuhnya teratasi dan tetap menjadi isu penting pembangunan ekonomi. Lapangan kerja merupakan sumber pendapatan utama bagi angkatan kerja yang aktif bekerja. Tinggi atau rendahnya pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemakmuran dan kesejahteraan individu serta keluarganya. Selain itu, lapangan kerja juga berfungsi sebagai wadah bagi sumber daya manusia untuk mengekspresikan kreativitas dan keterampilan mereka dalam produksi. Kerja sendiri merupakan aktivitas di mana individu dapat mengekspresikan kemampuan dan kreativitas mereka. Angkatan kerja merujuk pada individu usia kerja yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam kegiatan produksi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kategori individu yang bekerja mencakup mereka yang secara aktif terlibat dalam proses produksi selama setidaknya satu minggu tanpa gangguan dan menerima upah atau penghasilan selama periode tersebut. Selain itu, individu yang sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kategori angkatan kerja, meskipun mereka belum memiliki pekerjaan tetapi sedang berupaya mencari peluang kerja.

Kesempatan kerja sering menjadi masalah dalam pembangunan karena pertumbuhan angkatan kerja yang setiap tahunnya selalu bertambah tidak sejalan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang diikuti oleh kegiatan ekonomi, khususnya kesempatan kerja, sehingga menimbulkan masalah ekonomi yang serius seperti pengangguran yang menjadi masalah yang cukup serius di setiap daerah. Karena dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi, pengangguran merupakan masalah yang sangat rumit. Jika pengangguran tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan masalah sosial.

Masalah strategis pemerintah Jawa Tengah adalah angka pengangguran yang masih tinggi, kedua setelah Jawa Barat. Banyak orang kesulitan mencari pekerjaan atau menganggur karena sejumlah faktor, termasuk PDRB, upah minimum, dan angka kehadiran sekolah, serta besarnya angkatan kerja yang muncul setiap tahun. Dalam hal ini, situasi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan yang telah diciptakan tidak mampu menyerap kesempatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Akibatnya, masalah pengangguran di negara-negara tersebut terus memburuk dari tahun ke tahun.

Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



Sumber: BPS Indonesia

Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,19% ditunjukkan pada Gambar 1.1. Dengan rata-rata 8,93 persen, Banten memiliki TPT tertinggi, disusul Jawa Barat sebesar 8,83 persen, DKI Jakarta sebesar 7,71 persen, Jawa Timur 4,8 persen, dan D.I Yogyakarta sebesar 3,79 persen. Diakui bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah bukanlah yang tertinggi. Meskipun demikian, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah masih relatif tinggi karena minimnya pemanfaatan tenaga kerja.

Gambar 1.1 juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di pulau jawa selama tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi yang dimana pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang sangat signifikan dibanding tahun 2019 yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Hal ini berpengaruh pada menurunnya kinerja di berbagai sektor, menurunnya daya beli masyarakat yang diiringi dengan kebijakan yang membatasi pelayanan publik serta kegiatan masyarakat. Selain itu, banyak pelaku usaha atau perusahaan yang berhenti produksi akibat pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap karyawan yang akhirnya diberhentikan sehingga semakin menambah jumlah pengangguran.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia pada periode Agustus 2022 mencapai 143,72 juta orang, meningkat sebesar 2,55% dibandingkan dengan periode

yang sama pada Agustus 2021. Menurut Febryana (2016), peningkatan angkatan kerja ini merupakan indikasi positif bagi pasar tenaga kerja, karena menunjukkan bahwa lebih banyak individu yang siap dan bersedia untuk bekerja. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja tidak selalu sejalan dengan peningkatan permintaan tenaga kerja secara proporsional. Faktor lain, seperti tingkat pendidikan angkatan kerja, juga berperan penting dalam mempengaruhi kemampuan pasar kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi telah mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja secara signifikan, namun di sisi lain, peningkatan kesempatan tenaga kerja masih terbatas. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran sendiri merupakan masalah serius yang dihadapi oleh baik negara berkembang maupun negara maju. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang proaktif dari negara untuk menurunkan tingkat pengangguran, guna mengurangi dampak kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya yang timbul akibat pengangguran (Chusna Arifatul, 2013).

Gambar 1. 3 Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja (Jiwa)



Sumber: BPS Indonesia

Gambar 1.2 menunjukkan data jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah. Terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun. Berdasarkan angka pada gambar 1.2, jumlah penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebanyak 17.186.674 orang. Kemudian pada tahun 2018 jumlah tersebut meningkat menjadi 17.413.869 orang. Selain itu, jumlah penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 17.602.917 orang. Akan tetapi, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja menjadi 17.536.935 orang pada tahun 2020. Jumlah penduduk yang

terserap ke dalam angkatan kerja kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 17.835.770 orang. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang terserap ke dalam angkatan kerja kembali meningkat yaitu sebanyak 18.390.459 orang.

Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah peningkatan struktur upah melalui kebijakan upah minimum. Kebijakan upah minimum ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan individu yang bekerja, sehingga secara keseluruhan rata-rata upah tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Selain kebijakan upah minimum, terdapat pula upaya lain untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, salah satunya adalah melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB). Penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan erat dengan PDRB, karena peningkatan PDRB mencerminkan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan PDRB biasanya diiringi oleh peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi seiring dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa, yang tercermin dalam peningkatan PDRB (Hafiz et al. 2021).

PDRB memiliki dampak signifikan terhadap jumlah angkatan kerja yang terserap, dengan asumsi bahwa peningkatan PDRB akan diikuti oleh kenaikan nilai tambah output atau penjualan di seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah.

Gambar 1. 4 Laju PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.3, terlihat bahwa laju perkembangan PDRB di Daerah Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PDRB pada tahun 2017 mencapai 893.750.296, kemudian meningkat menjadi 991.516.543 pada tahun 2019. Angka tersebut menurun menjadi 965.225.709 pada tahun 2020, namun meningkat menjadi 1.050.322.000 pada tahun 2022. Meningkatnya permintaan tenaga kerja tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu

daerah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mendorong perluasan kesempatan berusaha, meningkatkan output, dan dengan demikian meningkatkan tenaga kerja.

Selain PDRB, upah juga merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Upah adalah kompensasi yang diterima oleh individu atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, yang biasanya diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang berlaku, dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja. Hubungan antara upah dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa penerapan upah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Di satu sisi, penerapan upah dapat berkontribusi pada peningkatan pengangguran, namun di sisi lain, hal ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja dan mengoptimalkan laba (Rakhmawati & Boedirochminarni, 2018). Upah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pasokan tenaga kerja. Ketika upah meningkat, permintaan terhadap tenaga kerja cenderung menurun, karena beban biaya yang ditanggung perusahaan semakin besar, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, rata-rata upah buruh di Indonesia mencapai 2,89 juta rupiah, meskipun jumlah tersebut dapat bervariasi di setiap daerah. Di Provinsi Jawa Tengah, upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan oleh Gubernur dan berlaku khusus untuk pekerja dengan masa kerja hingga satu tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, upah yang diberikan tidak mengacu pada UMK yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, setiap pekerja akan merundingkan besaran upah mereka secara individual dengan perusahaan tempat mereka bekerja.

Gambar 1. 5 Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah (Ribuan Rupiah)



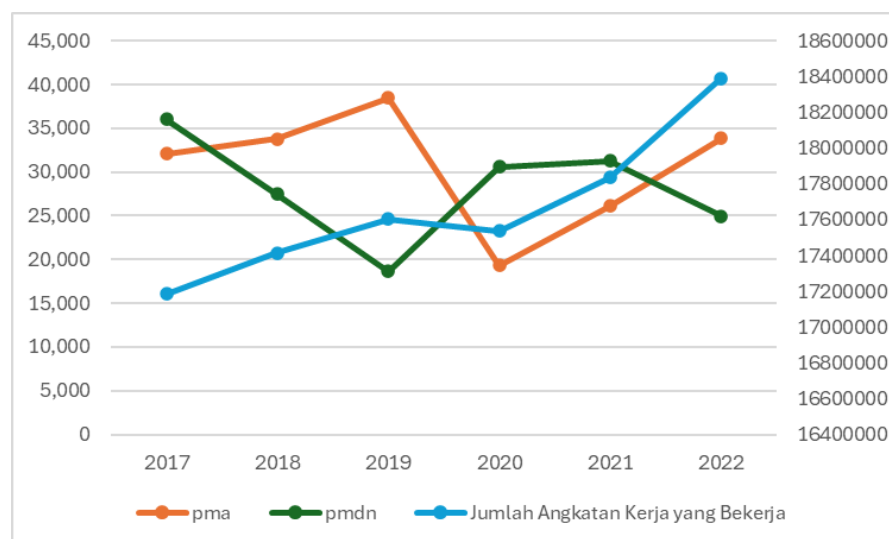
Sumber: BPS Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.4, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 yang mencapai 1.367.000, yang kemudian meningkat menjadi 1.812.000 pada tahun 2022. Nilai yang ditetapkan perusahaan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan diwakili oleh upah yang

dibayarkan kepada karyawan. Upah adalah pembagian gaji perusahaan kepada karyawan selama periode waktu tertentu. Biaya produksi perusahaan pasti akan naik jika upah terus naik. Harga jual produk dapat naik sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi, yang pada gilirannya memengaruhi daya beli konsumen. Perusahaan akhirnya mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah karyawan guna mempertahankan kesinambungan operasional normal sebagai respons terhadap kenaikan upah tahunan.

Investasi merupakan sumber modal yang penting untuk pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam upaya membangun ekonomi, pemerintah memerlukan modal yang signifikan, namun seringkali mengalami keterbatasan dalam penyediaannya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan investasi, baik dalam negeri, yang dikenal sebagai Penanaman Modal Asing (PMDN), maupun dari luar negeri, atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Gambar 1. 6 Total PMA, PMDN dan Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja



Sumber: BPS Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.5, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara investasi PMA dan PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017 hingga 2022. Secara umum, peningkatan investasi, terutama PMA, berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat jelas pada 2019 dan 2022, di mana peningkatan PMA yang signifikan diikuti oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan investasi, seperti yang terjadi pada tahun 2020 ketika PMA mengalami penurunan tajam, cenderung disertai dengan penurunan dalam jumlah tenaga kerja yang terserap, meskipun PMDN mengalami kenaikan pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa PMA memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan PMDN

dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh proyek yang sering kali lebih besar dan bersifat padat karya dalam investasi asing, serta teknologi dan manajemen yang lebih maju yang dibawa oleh investor asing, yang pada akhirnya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mendorong masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) melalui penerbitan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2015 yang mengatur Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2025. Kebijakan PMA di Jawa Tengah difokuskan untuk menciptakan perekonomian daerah yang kompetitif dan berkelanjutan di masa depan. Kawasan industri di Jawa Tengah yang menerima PMA terbesar meliputi Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Terboyo, dan LIK Bugangan. Adanya Kawasan Industri Kendal (KIK) memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Provinsi Jawa Tengah, KIK telah menciptakan ribuan lapangan kerja baru, terutama di sektor manufaktur yang mencakup industri otomotif, tekstil, furnitur, dan makanan minuman. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dapat ditekan secara signifikan, terutama di kalangan tenaga kerja semi-terampil dan terampil. Sebagian besar investasi asing yang masuk berasal dari sektor energi seperti listrik dan gas, serta industri tekstil dan alas kaki.

Berdasarkan konteks tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Upah Minimum Regional, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap penyerapan kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022?

5. Apakah terdapat pengaruh Belanja Pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022?
6. Apakah terdapat pengaruh *Dummy* Covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022.
2. Menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022.
3. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022.
4. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022.
5. Menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022.
6. Menganalisis pengaruh *Dummy* Covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berharga bagi penulis mengenai penulisan karya ilmiah serta pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi penelitian selanjutnya demi kemajuan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, struktur penulisan dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Kajian Pustaka

Bab ini memuat tinjauan pustaka penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini landasan teori yang terkait, serta formulasi hipotesis..

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan jenis dan metode pengumpulan data, sumber data yang digunakan dalam penelitian, variabel-variabel yang dianalisis, serta metode analisis yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV. Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini mencakup pembahasan hasil penelitian, termasuk penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta implikasi dari kesimpulan tersebut. Bab ini juga merumuskan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dan memberikan saran berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan rangkuman dari penelitian sebelumnya yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian. Dalam penulisan skripsi, penting untuk merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai pembandingan terhadap kekurangan atau kelebihan dari penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar atau pertimbangan untuk melaksanakan penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :

Penelitian Pramono dan Firdayetti (2020) yang berjudul “Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015 – 2020” bertujuan untuk mengetahui pengaruh UMR, PDRB, dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Regresi data panel digunakan untuk melihat pengaruh faktor-faktor tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Efek Tetap merupakan model yang paling tepat, dengan UMR berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi tersebut, sedangkan variabel PDRB juga berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian Izzah et al. (2021) yang berjudul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah” bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat upah, dan produk domestik bruto (PDRB) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder kuantitatif dalam bentuk deret waktu selama sepuluh tahun (2010-2019) dengan Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel jumlah tenaga kerja dan PDRB secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara tingkat upah secara simultan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Ridwan Fajar Hidayat (2022) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991-2020” bertujuan untuk menganalisis peran PDRB, angkatan kerja, dan UMP dalam meningkatkan kesempatan kerja selama periode 1991-2020. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda, dengan penerapan uji asumsi klasik dan uji statistik yang meliputi Uji t, Uji f, dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan pertumbuhan UMP memiliki pengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Sebaliknya, variabel angkatan kerja menunjukkan pengaruh signifikan yang negatif terhadap peningkatan kesempatan kerja. Temuan lainnya mengindikasikan adanya pengaruh antara variabel PDRB, angkatan kerja, dan pertumbuhan UMP dalam meningkatkan kesempatan kerja di Jawa Tengah selama periode 1991-2020. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja di Jawa Tengah, seperti suku bunga, investasi, jumlah perusahaan, dan nilai produksi.

Tujuan Ni Putu Ambar Pratiwi dan Gusti Bagus Indrajaya (2019) adalah untuk mengevaluasi kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali dan mengkaji bagaimana ekspansi ekonomi dan belanja pemerintah mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyediakan data penelitian. Analisis Jalur merupakan metode analisis yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dipengaruhi secara negatif oleh ekspansi ekonomi. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dipengaruhi secara positif oleh belanja pemerintah. Di Provinsi Bali, kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi secara positif oleh belanja pemerintah dan penyerapan tenaga kerja. Bagaimanapun, pembangunan keuangan tidak menunjukkan hasil yang konstruktif terhadap bantuan pemerintah daerah di daerah. Di Provinsi Bali, penyerapan tenaga kerja memediasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak memediasi dampak belanja pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dari tahun 2013 hingga 2017.

Penelitian Kenraraswati et al. (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan data time series Provinsi Jambi tahun 2000 sampai dengan tahun 2016. Data dianalisis menggunakan model regresi berganda dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa PMDN meningkat sebesar 11,67 persen per tahun, UMP meningkat sebesar 16,44 persen per tahun, dan belanja modal meningkat sebesar 20,00 persen per tahun. Secara keseluruhan, PMDN, UMP, dan Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi; namun, Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Di sisi lain, PMDN dan UMP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

Penelitian Insana & Kafrawi Mahmud (2021) yang berjudul “Dampak Upah, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Takalar” ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak dari Upah Minimum Regional, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar”. Penelitian

ini dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori, menggunakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data yang diterapkan adalah regresi liner. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Upah Minimum Regional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar. Rata-rata lama sekolah memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan upah minimum untuk memperkuat daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk memfokuskan kebijakan pada peningkatan pendidikan dan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian Hafiz et al. (2021) yang berjudul “Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020” bertujuan untuk mengkaji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Dalam penelitian ini, penyerapan tenaga kerja merupakan variabel dependen, sedangkan PDRB, UMK, dan IPM merupakan variabel independen. Jenis penelitian ini menggunakan data panel dari 27 sektor Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dan bersifat deskriptif kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah OLS atau Ordinary Least Squares dan estimasi Random Effect Model. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, UMK, dan IPM secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Di Kabupaten/Kota Jawa Barat, semua variabel independen tersebut secara simultan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Permatasari et al., (2023) berjudul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021”, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian Permatasari et al., (2023) menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi sebagai variabel independen. Sementara itu, penelitian saya menggunakan PDRB, Upah Minimum, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Belanja Pemerintah serta Covid-19 sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian Permatasari et al., (2023) menggunakan data panel dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2017-2021, sedangkan penelitian saya mencakup data panel dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2022.

Dari segi metode analisis, penelitian Permatasari et al., (2023) menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) dan estimasi Random Effect Model. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa secara parsial, UMP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan PDRB dan Investasi memberikan pengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, UMP, PDRB, dan Investasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya, penelitian saya menggunakan estimasi Fixed Effect Model, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, variabel PDRB, Upah Minimum, PMA, PMDN, dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Secara parsial, variabel PDRB, Upah Minimum, dan PMA berpengaruh positif dan signifikan, sementara variabel PMDN dan Belanja Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, variabel Covid-19 juga menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah proses di mana tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu disalurkan ke berbagai sektor pekerjaan. Tingkat penyerapan ini bisa sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan peluang tenaga kerja yang ada. Jika tingkat penyerapan tenaga kerja sejajar dengan peluang tenaga kerja yang tersedia, hal ini akan menghasilkan kondisi tanpa pengangguran. Namun, apabila penyerapan tenaga kerja lebih rendah dari jumlah peluang kerja yang ada, maka akan muncul pengangguran di beberapa sektor tertentu (Feriyanto, 2014). Peningkatan jumlah pengangguran menyebabkan pemborosan sumber daya manusia yang berharga, menambah beban sosial, menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan, serta menciptakan ketidakstabilan sosial yang signifikan.

2.2.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah individual yang berusia produktif dan memiliki kemampuan fisik maupun intelektual untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa, yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, tenaga kerja adalah setiap individu yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja merujuk pada penduduk yang berada dalam usia kerja, yang umumnya didefinisikan sebagai penduduk berusia 15 tahun ke atas, yang secara aktif dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik melalui bekerja maupun mencari pekerjaan. Ada dua kategori tenaga kerja menurut BPS yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja adalah individu yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah individu yang berada dalam usia kerja namun tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau mereka yang tidak sedang mencari pekerjaan.

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi yang mengukur total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah atau provinsi selama periode tertentu. PDRB mencakup semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tersebut, dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input dalam proses produksi, sehingga memberikan gambaran mengenai kontribusi ekonomi suatu daerah.

Dalam menghitung PDRB, terdapat dua metode perhitungan utama yang dikenal sebagai pendekatan distribusi pendapatan (ADHK) dan pendekatan distribusi barang dan jasa (ADHB).

Kedua pendekatan ini memiliki cara berbeda untuk mengukur PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Distribusi Pendapatan (ADHK), menghitung PDRB berdasarkan distribusi pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah. Dalam metode ini, PDRB dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja, pemilik modal, dan faktor produksi lainnya. Komponen pendapatan yang diperhitungkan meliputi upah dan gaji, keuntungan usaha, sewa dan bunga. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana pendapatan dari kegiatan ekonomi didistribusikan di antara berbagai faktor produksi dan kelompok ekonomi.
2. Pendekatan Distribusi Barang dan Jasa (ADHB), mengukur PDRB berdasarkan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dan dikonsumsi dalam wilayah tersebut. Metode ini mencakup perhitungan nilai tambah dari setiap sektor ekonomi, dengan cara menjumlahkan nilai output yang dihasilkan dan mengurangi nilai input antara sektor-sektor ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan kontribusi masing-masing sektor terhadap total nilai barang dan jasa yang diproduksi, serta menunjukkan hasil akhir dari aktivitas produksi di wilayah tersebut.

2.2.4 Upah Minimum

UMR adalah upah minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan regional, sektor, atau subsektor tertentu. UMR mencakup gaji pokok dan tunjangan. Penentuannya didasarkan pada kesepakatan antara Lembaga pengupahan UMR adalah untuk memenuhi standar hidup minimum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

UMR di Indonesia diatur dalam Permenakertrans No. 15 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Penerapan upah minimum didasarkan

pada hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL), serta mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi ekonomi lainnya. Dalam Permenakertrans No. 15 Tahun 2018 menjelaskan terdapat dua jenis upah minimum yaitu, Upah Minimum Provinsi (UMP), yang berlaku secara umum di seluruh wilayah provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota tertentu.

2.2.5 Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor asing untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia, baik dengan modal asing sepenuhnya maupun dalam bentuk patungan dengan modal dalam negeri.

Keberadaan Penanaman Modal Asing di suatu negeri atau daerah membawa beberapa keuntungan, antara lain terciptanya lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan adanya tambahan modal untuk mendanai sektor-sektor yang kekurangan dana.

2.2.6 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh modal domestik atau modal dalam negeri, baik oleh perorangan maupun badan usaha. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) menjelaskan bahwa kegiatan PMDN dapat dijalankan melalui badan hukum, non badan hukum, atau usaha perseorangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PMDN merupakan kegiatan penanaman modal untuk menjalankan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri ini meliputi perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia (seperti Perseroan Terbatas), atau pemerintah daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Indonesia.

2.2.7 Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai aktivitas dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran ini mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan pelayanan publik lainnya. Tujuan utama dari pengeluaran pemerintah adalah untuk menyediakan barang dan jasa publik, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong stabilitas makroekonomi. Melalui pengeluaran ini, pemerintah berperan aktif dalam mengatur perekonomian dan memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata di kalangan masyarakat.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan antara PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan pertumbuhan nilai total produksi dari para produsen di suatu wilayah. Oleh karena itu, PDRB memiliki dampak terhadap peningkatan tenaga kerja guna menjaga stabilitas produksi. PDRB memiliki korelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja, karena PDRB adalah indikator pertumbuhan ekonomi, dengan demikian peningkatan PDRB cenderung memperluas peluang kerja yang tersedia (Puspita et al. 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Julia Dwi Budiasih dan Kiky Asmara (2024), bahwa PDRB terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB akan mendorong peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, sementara penurunan PDRB dapat menyebabkan penurunan dalam jumlah tenaga kerja yang terserap.

2.3.2 Hubungan antara Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah minimum memiliki hubungan yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah berfungsi sebagai batas terendah yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja. Peningkatan upah minimum memiliki dua dampak yang berbeda terhadap penyerapan tenaga kerja. Di satu sisi, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli pekerja, yang pada gilirannya mendorong permintaan barang dan jasa, serta meningkatkan produksi dan kebutuhan kerja. Namun di sisi lain, kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan, yang berpotensi menurunkan kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja atau bahkan melakukan pengurangan tenaga kerja untuk mengimbangi biaya yang lebih tinggi. Hal ini juga dijelaskan oleh (Puspita et al. 2021), yang menyatakan bahwa peningkatan upah minimum dapat berimplikasi negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah minimum dipandang sebagai tambahan beban finansial oleh pengusaha, meningkat mereka diwajibkan untuk memberikan kompensasi yang lebih tinggi kepada karyawan. Konsekuensinya, hal ini dapat memicu pengurangan tenaga kerja yang direkut, sebagai upaya perusahaan untuk menekan biaya operasional.

2.3.3 Hubungan antara PMA terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki korelasi yang signifikan dengan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. PMA berperan sebagai katalisator dalam penciptaan lapangan kerja melalui investasi langsung yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Investasi ini biasanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendirian pabrik, dan pengembangan sektor jasa yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan demikian, aliran PMA yang meningkat cenderung diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja, sehingga berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan

kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia mengindikasikan bahwa sektor-sektor dengan aliran PMA yang tinggi, seperti industri pengolahan dan sektor jasa, mengalami peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja hal ini menunjukkan bahwa PMA tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi tetapi juga menciptakan peluang kerja yang lebih luas

2.3.4 Hubungan antara PMDN terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengacu pada investasi yang dilakukan oleh entitas lokal, baik individu maupun perusahaan, dalam perekonomian suatu negara. Investasi ini seringkali diarahkan pada pembangunan infrastruktur, ekspansi usaha, dan pengembangan sektor-sektor strategis yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan demikian, peningkatan aliran PMDN cenderung berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, mengindikasikan bahwa sektor-sektor dengan investasi domestik yang tinggi, seperti industri manufaktur, konstruksi, dan pertanian, mengalami peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Investasi domestik ini tidak hanya memperkuat kapasitas produksi nasional tetapi juga menciptakan peluang kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2.3.5 Hubungan antara Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

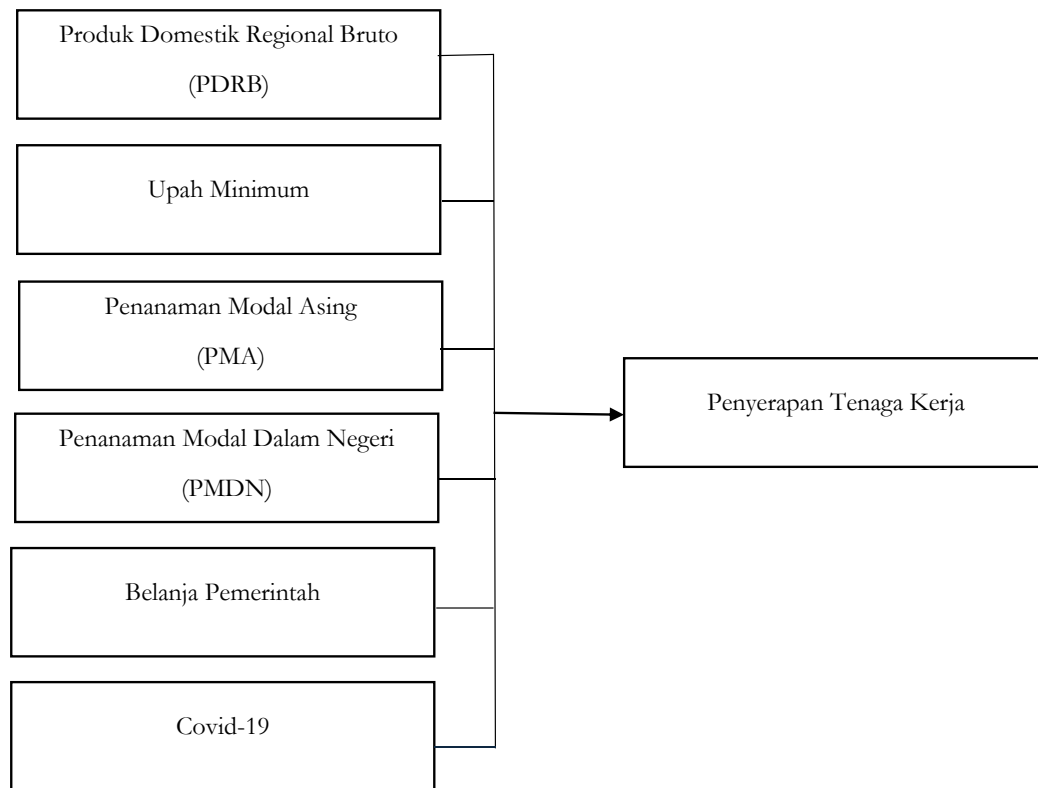
Belanja pemerintah memiliki korelasi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor publik lainnya, hal ini menciptakan permintaan yang lebih tinggi terhadap tenaga kerja. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur, misalnya, membutuhkan pekerja dalam jumlah besar untuk konstruksi dan pemeliharaan, sehingga langsung berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, pengeluaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga medis, pendidik, dan staf pendukung lainnya.

Belanja pemerintah yang efisien dan tepat sasaran dapat berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah di sektor-sektor strategis berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pekerjaan yang tersedia. Di Indonesia, peningkatan anggaran infrastruktur terbukti meningkatkan jumlah pekerja yang terserap di sektor konstruksi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Tinjauan pustaka mencakup kerangka konseptual, yang memberikan ringkasan dari semua landasan teori dan konsep yang dibahas dalam penelitian ini. Diagram yang menggambarkan

perkembangan proses penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan kerangka konseptual penelitian ini. Kerangka konseptual tersebut dijelaskan sebagai berikut:



2.5 Formulasi Hipotesis

Hipotesis adalah respons awal terhadap masalah penelitian yang nantinya akan diuji kebenarannya menggunakan data yang terkumpul dan dianalisis. Berdasarkan teori dan konteks masalah, hipotesis dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. PDRB diyakini memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Upah Minimum diyakini memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. PMA diyakini memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. PMDN diyakini memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Belanja Pemerintah diyakini memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. *Dummy* Covid-19 diyakini memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Pengumpulan Data

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu menggabungkan data cross-sectional dari dua puluh sembilan kabupaten dan enam kota di Provinsi Jawa Tengah dengan data time series tahun 2017-2022. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto (PDRB), Upah Minimum, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Belanja Pemerintah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen dan variabel independen merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur konsep-konsep operasional yang dapat diukur dengan nilai-nilai berbeda, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang subjek yang diteliti. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja (Y), sementara variabel independennya meliputi PDRB (X1), Upah minimum (X2), PMA (X3), PMDN (X4), dan belanja pemerintah (X5) di Provinsi Jawa Tengah.

3.2.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel dependen yang digunakan adalah Penyerapan Tenaga Kerja, yang datanya diambil dari BPS untuk periode 2017 – 2022. Penyerapan tenaga kerja mengacu pada jumlah total tenaga kerja yang terserap di pasar kerja. Data ini diperoleh dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan jiwa, untuk mengukur tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi tersebut.

3.2.2 PDRB

Nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Studi ini menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2017 hingga 2022. Data tersebut dinyatakan dalam jutaan rupiah.

3.2.3 Upah Minimum

Pengusaha dan pelaku usaha menggunakan Upah Minimum untuk membayar karyawan, buruh, atau pekerja di lingkungan usahanya. Data upah minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum dalam mata uang rupiah untuk setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2.4 PMA

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas asing di suatu negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Penelitian ini menggunakan data dari BPS untuk periode 2017-2022, dengan data realisasi penanaman modal asing per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dalam satuan Juta Rupiah.

3.2.5 PMNDN

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perusahaan, atau entitas dalam negeri di suatu negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. PMDN mencakup pembelian aset, pendirian pabrik, atau pengembangan usaha di wilayah negara tersebut oleh investor lokal. Penelitian ini menggunakan data dari BPS untuk periode 2017 – 2022, memanfaatkan data realisasi penanaman modal dalam negeri per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dalam satuan Juta Rupiah.

3.2.6 Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah adalah jumlah uang yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, ini mencakup biaya untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembayaran untuk layanan polisi dan militer, gaji pegawai negeri, serta pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, dan lain-lain di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017 – 2022, dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

3.2.7 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Selain faktor internal yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, faktor eksternal juga turut berperan dalam terjadinya penyerapan tenaga kerja. Faktor eksternal ini muncul sebagai akibat dari kondisi yang tidak diinginkan dan berada di luar kendali perusahaan maupun pemerintah. Beberapa faktor eksternal tersebut mencakup perubahan kebijakan ekonomi, fluktuasi harga, komoditas, serta krisis global yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Sebagai contoh, pada periode 2020 hingga 2022, ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan proteksionis di beberapa negara mitra dagang utama berkontribusi terhadap penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Dalam penelitian ini, variabel Covid-19 digunakan sebagai variabel dummy, di mana periode sebelum 2020 diberi nilai 0, sementara periode 2020 hingga 2022 diberi nilai 1, yang menunjukkan dampak signifikan dari faktor eksternal pada penyerapan tenaga kerja selama periode tersebut.

3.3 Metode Analisis Penelitian

Metode regresi data panel digunakan untuk analisis dalam penelitian ini. Data panel merupakan gabungan data cross-sectional dan time series yang bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak kebebasan dengan cara menambah jumlah observasi dan data penelitian.

(Widarjono Agus, 2018), menegaskan bahwa gabungan kedua jenis data ini dapat menjadi sarana penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh eliminasi variabel. E-views 12 dan Excel 365 merupakan perangkat lunak yang digunakan peneliti untuk membantu analisis regresi data panel.

3.4 Estimasi Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, untuk menentukan model estimasi regresi data panel yang paling sesuai, diperlukan estimasi data panel menggunakan metode Fixed Effect, Common Effect, dan Random Effect (Widarjono Agus, 2018).

3.4.1 Common Effect Models (CEM)

Common effect model, yang menggabungkan data time series dengan data cross-section tanpa mempertimbangkan variasi antar waktu dan individu, merupakan salah satu model estimasi data panel yang paling dasar. Model ini mengasumsikan bahwa data cross-section tetap konsisten sepanjang waktu. Persamaan regresi untuk model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y	= Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Konstanta regresi
X_{1it}	= PDRB (juta rupiah)
X_{2it}	= Upah Minimum (ribu rupiah)
X_{3it}	= PMA (juta rupiah)
X_{4it}	= PMDN (juta rupiah)
X_{5it}	= Belanja Pemerintah (Juta Rupiah)
i	= Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah
t	= Tahun yang diteliti (2017-2022)
e_{it}	= Error Term

3.4.2 Fixed Effect Models (FEM)

Model fixed effect, yang juga dikenal sebagai teknik Least Squares Dummy Variables (LSDV), mengasumsikan adanya perbedaan pada intersep dalam persamaan, sementara kemiringan (slope) tetap konstan. Model ini diestimasi menggunakan variabel dummy, di mana diperlukan k-1 variabel dummy. Persamaan untuk model fixed effect adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{34} D_{34} + e_{it}$$

Keterangan :

Y	= Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa)
---	----------------------------------

β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Konstanta regresi
X_{1it}	= PDRB (juta rupiah)
X_{2it}	= Upah Minimum (ribu rupiah)
X_{3it}	= PMA (juta rupiah)
X_{4it}	= PMDN (juta rupiah)
X_{5it}	= Belanja Pemerintah (Juta Rupiah)
D	= Dummy Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
α	= Tingkat Signifikan
i	= Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah
t	= Tahun yang diteliti (2017-2022)
e_{it}	= Error Term

3.4.3 Random Effect Models (REM)

Ketika terdapat masalah atau gangguan yang mungkin terkait dengan individu dan waktu, model random effect digunakan sebagai teknik estimasi data panel. Teknik ini juga digunakan untuk mengatasi penggunaan derajat kebebasan, yang dapat mempengaruhi efisiensi estimasi parameter. Persamaan untuk model random effect adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{34} D_{34} + e_{it}$$

Keterangan :

Y	= Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Konstanta regresi
X_{1it}	= PDRB (juta rupiah)
X_{2it}	= UMR (ribu rupiah)
X_{3it}	= PMA (juta rupiah)
X_{4it}	= PMDN (juta rupiah)
X_{5it}	= Belanja Pemerintah (Juta Rupiah)
D	= Dummy Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
ε	= Epsilon
α	= Tingkat Signifikan
i	= Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah
t	= Tahun yang diteliti (2017-2022)
e_{it}	= Error Term

3.5 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dapat menggunakan common effect model, fixed effect model, atau random effect model. Tujuan dari ketiga pendekatan ini adalah untuk menentukan strategi terbaik dalam menjelaskan korelasi penelitian antara variabel independen dan dependen. Untuk memilih pendekatan terbaik, analisis regresi data panel dilakukan dalam dua tahap. Uji Chow digunakan untuk membandingkan fixed effect model dengan common effect model untuk menentukan model mana yang lebih baik. Selain itu, fixed effect model dan random effect dikontraskan menggunakan uji Hausman untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam mengatasi masalah penelitian ini.

3.5.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model fixed effect dan model common effect untuk estimasi data panel. Uji F atau Chi-Square digunakan untuk menentukan apakah probabilitas pemilihan model yang tepat lebih kecil atau lebih besar dari alfa (0,01). Hipotesis berikut diuji dalam pengujian ini:

H0: Common Effect Model lebih unggul daripada Fixed Effect Model

H1: Fixed Effect Model lebih unggul daripada Common Effect Model

Common Effect Model dipilih jika H0 tidak ditolak, yang berarti bahwa probabilitasnya lebih besar daripada alfa (0,01). Di sisi lain, Fixed Effect Model digunakan jika H0 ditolak dengan probabilitas kurang dari alfa (0,01).

3.5.2 Uji Lagrange Multiplier

Untuk menentukan model optimal antara model random effect dan model common effect dalam estimasi data panel, uji Lagrange Multiplier digunakan. Hipotesis yang diuji dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H0: Common Effect Model lebih baik daripada Random Effect Model

H1: Random Effect Model lebih baik daripada Common Effect Model

Saat memilih model yang tepat, uji Breusch-Pagan digunakan untuk menentukan apakah probabilitasnya lebih kecil atau lebih besar dari alfa (0,01). Common Effect Model dipilih jika H0 tidak ditolak dengan probabilitas lebih tinggi dari alfa (0,01). Di sisi lain, Random Effect Model diterapkan jika H0 ditolak dengan probabilitas yang lebih kecil dari alfa (0,01).

3.5.3 Uji Hausman

Uji hausman adalah uji statistik yang dipakai buat menentukan model fixed effect atau model random effect yang lebih baik. Hipotesis diuji dalam pengujian ini:

H0 = Random Effect Model lebih baik dari Fixed Effect Model

H1 = Fixed Effect Model lebih baik dari Random Effect Model

Uji Chi-Square atau Cross Section untuk menentukan apakah probabilitasnya lebih besar atau lebih kecil dari alpha (0,01) guna mengidentifikasi model yang sesuai. Uji ini gagal menolak H_0 dan merupakan random effect model jika probabilitasnya lebih besar dari alpha (0,01). Menolak H_0 jika probabilitasnya turun di bawah alpha (0,01), dan model yang digunakan adalah Fixed Effect.

3.6 Pengujian Statistik

Uji statistik digunakan untuk mengevaluasi tingkat signifikansi hubungan antara koefisien regresi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Evaluasi ini melibatkan penggunaan koefisien determinasi (R^2), uji F untuk pengujian keseluruhan koefisien regresi secara bersama-sama, uji t untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara individu.

3.6.1 Koefisien Determinasi

Uji R-Squared digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-Squared, semakin kuat hubungan antara variabel independen dan dependen.

3.6.2 Uji F-Statistik (Kelayakan Model)

Uji statistik F digunakan untuk membandingkan koefisien regresi dengan menguji variabel independen secara terpisah dan simultan. Hipotesis nol perbandingan ini adalah:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, yang menunjukkan bahwa variabel independen dan dependen tidak memiliki hubungan simultan.

$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, yang menunjukkan bahwa variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan simultan.

H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel dependen tidak memiliki hubungan yang signifikan secara simultan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih rendah dari alpha, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang signifikan secara simultan.

3.6.3 Uji t-statistik (Uji Parsial)

Dalam membandingkan koefisien regresi, variabel independen diuji baik secara individual maupun secara bersamaan menggunakan uji F-statistik. Hipotesis nol yang diuji dalam perbandingan ini adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ yang menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel dependen tidak mempunyai hubungan secara simultan.

$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$ yang menunjukkan bahwa variabel dependen dan variabel indenpen mempunyai hubungan secara simultan. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila nilai

probabilitas lebih besar dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel dependen tidak mempunyai hubungan yang signifikan secara simultan. Sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih kecil dari alpha maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang signifikan secara simultan.

Uji t-statistik digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam pengujian ini, ada beberapa pilihan keputusan, yaitu:

$H_0: \beta_i = 0$, yang berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1: \beta_i < 0$, yang berarti variabel independen memiliki dampak negatif terhadap variabel dependen secara individual.

$H_1: \beta_i > 0$, yang berarti variabel independen memiliki dampak positif terhadap variabel dependen secara individual.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Data cross-sectional dan time series dari panel digunakan bersama dengan data jenis ini. Data cross-sectional dan time series tentang PDRB, upah minimum, PMA, dan PMDN serta belanja pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2017 dan 2018 dikumpulkan dari 35 kota dan daerah. Data yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Perangkat lunak Eviews 10 digunakan untuk pengujian estimasi.

Statistik deskriptif merupakan salah satu jenis analisis yang menggambarkan karakteristik variabel suatu penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Standar deviasi dihitung sebagai akar dari jumlah kuadrat selisih setiap nilai data dengan rata-rata data, sedangkan nilai rata-rata diperoleh dengan membagi jumlah data total dengan jumlah data yang ada. Nilai maksimum data disebut sebagai maksimum, sedangkan nilai minimum data disebut sebagai minimum. Temuan analisis statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maximum	Minimum
Penyerapan Tenaga Kerja	50460	994091	58582
PDRB	27784296	15387930	5820532
UMR	1855642	2835000	1370000
PMA	2901124	148361889	0.000000
PMDN	895571	16418900	1688500
Belanja Pemerintah	2420000000	9570000000	883000000
Dummy	0.500000	1.000000	0.000000

Sumber: olah data menggunakan Eviews 10

4.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Analisis statistik yang disajikan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mempekerjakan rata-rata 504.603 orang. Karena banyaknya pabrik dan perusahaan manufaktur serta sejumlah kawasan industri besar, Kota Semarang memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi dengan total 994.091 orang. Di sisi lain, Kota Magelang memiliki jumlah pekerja yang lebih sedikit

yaitu 58.582 orang karena skala ekonominya yang lebih kecil dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa Tengah lainnya seperti Kota Semarang dan Surakarta.

4.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan analisis statistik pada tabel 4.1 di Provinsi Jawa Tengah rata-rata mencapai Rp. 27.874.296 dengan PDRB tertinggi sebesar Rp. 15.387.930. Sementara itu, Kabupaten Magelang memiliki PDRB terendah sebesar Rp. 5.820.532.

4.1.3 Upah Minimum

Berdasarkan analisis statistik pada tabel 4.1 di Provinsi Jawa Tengah rata-rata adalah Rp. 1.855.642. Kota Semarang memiliki Upah minimum tertinggi sebesar 2.835.000, sedangkan Kabupaten Banjarnegara memiliki Upah minimum terendah Rp. 1.370.000.

4.1.4 Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan analisis statistik pada Tabel 4.1, Provinsi Jawa Tengah memiliki rata rata Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 2.901.124. Kabupaten Jepara memiliki Jumlah PMA tertinggi sebesar Rp. 148.361.889, yang disebabkan oleh posisi Kabupaten Jepara sebagai pusat industri mebel dan kerajinan kayu. Sebaliknya, Kabupaten Kebumen memiliki jumlah PMA yang paling rendah yaitu sebesar Rp. 0, yang disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan tidak memiliki sektor-sektor ekonomi yang menarik bagi investor asing.

4.1.5 Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan analisis statistik pada Tabel 4.1, Provinsi Jawa tengah memiliki rata-rata Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 895.571. Kota Magelang memiliki jumlah PMDN tertinggi sebesar Rp. 16.418.900, yang disebabkan oleh adanya pariwisata yang berkembang yaitu Candi Borobudur salah satu situs warisan dunia UNESCO dan terdapat institusi pendidikan tinggi dan akademi militer. Sebaliknya, Kabupaten Wonosobo memiliki jumlah PMDN terendah sebesar Rp. 1.688.500, yang disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Wonosobo yang berada di daerah pegunungan dan keterbatasan infrastruktur.

4.1.6 Belanja Pemerintah

Berdasarkan analisis statistik pada Tabel 4.1, rata-rata belanja pemerintah di Provinsi Jawa Tengah adalah Rp. 2.420.000.000. Kota Salatiga mencatat belanja pemerintah tertinggi sebesar Rp. 9.565.013.045, yang disebabkan adanya kebutuhan dalam bidang infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Proyek-proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, dan pemeliharaan lingkungan menjadi prioritas utama, sehingga membutuhkan anggaran yang signifikan. Sebaliknya, Kota Pekalongan memiliki belanja pemerintah terendah sebesar Rp. 883.184.895, disebabkan oleh Kota Pekalongan memiliki skala

ekonomi yang lebih kecil dibandingkan dengan Kota Salatiga, dengan pendapatan asli daerah yang terbatas berdampak pada alokasi pengeluaran pemerintah yang lebih rendah.

4.1.7 Dummy (Covid-19)

Berdasarkan analisis statistik Tabel 4.1, menunjukkan nilai minimal 0 yang dapat diartikan belum terjadi pandemi Covid-19 dan nilai maksimum 1 yang dapat diartikan sedang terjadi pandemi Covid-19

4.2 Hasil Estimasi

Common effect model, fixed effect model, dan random effect model merupakan tiga metode estimasi yang digunakan dalam analisis regresi data panel. Model yang dianggap paling efisien atau optimal akan dipilih dan digunakan untuk analisis data panel lebih lanjut.

4.2.1 Model Common Effect

Model Common Effect, yang menggabungkan data cross-sectional dan time series tanpa mempertimbangkan faktor individu atau waktu, merupakan salah satu model yang paling sederhana. Dalam model ini, kemiringan (slope) untuk data time series dan cross-sectional tetap sama, dengan koefisien intersep yang seragam untuk setiap kemiringan (Widarjono Agus, 2018). Tabel 4.2 menunjukkan hasil estimasi dari pengolahan data menggunakan model Common Effect.

Tabel 4. 2 Hasil Regresi Model Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	553343.1	112718.6	4.909068	0.0000
X1	0.004559	0.00063	7.234538	0.0000
X2	-0.18394	0.069081	-2.662686	0.0084
X3	0.001807	0.000856	2.110207	0.0361
X4	-0.003534	0.005812	-0.608023	0.5439
X5	0.0000567	0.0000122	4.638502	0.0000
DUMMY	53616.52	31302.2	1.712867	0.0883
R-squared	0.422087			
Adjusted R-squared	0.405006			

F-statistic	24.71064			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olah Eviews 12

4.2.2 Model Fixed Effect

Model fixed effect menerapkan teknik yang mempertimbangkan variasi pada intersep sambil menjaga kemiringan tetap konstan di seluruh unit. Dalam model ini, variabel dummy digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan intersep antara variabel (Widarjono Agus, 2018).

Tabel 4.3 menyajikan hasil estimasi dari pengolahan data menggunakan model fixed effect.

Tabel 4. 3 Hasil Regresi Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	384690.6	22271.81	17.27253	0.0000
X1	0.002351	0.000705	3.334904	0.0001
X2	0.030888	0.015739	1.962475	0.0513
X3	0.00031	0.000102	3.042461	0.0027
X4	-0.000137	0.000666	-0.205838	0.8372
X5	-0.00000130	0.00000245	-0.894477	0.3723
DUMMY	-764.357	5213.074	-0.146623	0.8836
R-squared	0.995032			
Adjusted R-squared	0.993856			
F-statistic	846.2487			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olah Eviews 12

4.2.3 Model Random Effect

Model random effect adalah model data panel yang memungkinkan adanya hubungan antar unit dengan menggunakan variabel gangguan dalam proses estimasinya (Widarjono, 2018). Tabel 4.4 menyajikan hasil estimasi dari pengolahan data menggunakan model random effect.

Tabel 4. 4 Hasil Regresi Model Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	380483.2	31231.48	12.18268	0
X1	0.003191	0.000565	5.647597	0
X2	0.019592	0.014975	1.308327	0.1922
X3	0.0003	0.000102	2.948485	0.0036
X4	-0.000254	0.000664	-0.382248	0.7027
X5	-9.61E-07	1.45E-06	-0.664068	0.5074
DUMMY	1578.181	5125.342	0.307917	0.7585
R-squared	0.340846			
Adjusted R-squared	0.321364			
F-statistic	17.4951			
Prob(F-statistic)	0			

Sumber: Olah Eviews 12

4.3 Pemilihan Model

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow, melalui analisis distribusi p-value, digunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect dan Fixed Effect. Dalam metode ini, model Common Effect dipilih jika nilai probabilitasnya lebih tinggi dari alpha (10%). Namun, jika nilai probabilitasnya kurang dari alpha (10%), model Fixed Effect menjadi pilihan terbaik. Tabel 4.5 menyajikan hasil Uji Chow.

Tabel 4. 5 Hasil Data Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	573.264634	(34,168)	0.0000
Cross-section Chi-square	998.852936	34	0.0000

Sumber: Olah data menggunakan Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian di atas, H_a diterima dan H_0 ditolak karena nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari α 0,01. Oleh karena itu, model Fixed Effect adalah yang paling tepat digunakan.

4.3.2 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier merupakan pendekatan yang paling efisien untuk memilih model terbaik antara Random Effect dan Common Effect. Jika nilai probabilitas Breusch-Pagan lebih tinggi dari α (10%), model Common Effect dianggap sebagai yang terbaik. Di sisi lain, jika nilai probabilitas lebih rendah dari α (10%), model Random Effect dianggap sebagai yang terbaik. Hasil Uji Lagrange Multiplier disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	395.6802312 0.0000	1.711177 -0.1908	397.391408 0.0000
Honda	19.89171263 0.0000	-1.30812 -0.9046	13.1405846 0.0000
King-Wu	19.89171263 0.0000	-1.30812 -0.9046	5.90098492 0.0000
Standardized Honda	20.80166906 0.0000	-0.83822 -0.799	10.8970785 0.0000
Standardized King-Wu	20.80166906	-0.83822	4.28369778

	0.0000	-0.799	0.0000
Gourieroux, et al.	--	--	395.680231
			0.0000

Sumber: Hasil Olah Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian di atas, H_a diterima dan H_0 ditolak karena nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,01. Oleh karena itu, model Random Effect adalah yang paling tepat digunakan.

4.3.3 Uji Hausman

Saat memilih antara model Random Effect dan Fixed Effect, uji Hausman merupakan pendekatan yang paling efektif. Model Random Effect dipilih sebagai yang terbaik jika nilai probabilitas dari cross-section acak lebih besar dari alpha (10%). Namun, model Fixed Effect dianggap lebih tepat ketika nilai probabilitas turun di bawah alpha (10%). Hasil Uji Hausman ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.145357	6	0.0000

Sumber: olah data menggunakan Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian di atas, H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai probabilitas random cross-section sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,01. Dengan demikian, model Fixed Effect adalah pilihan yang paling tepat.

4.4 Evaluasi Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Models (FEM)*

Tabel 4. 8 Estimasi Uji Regresi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	384690.6	22271.81	17.27253	0.0000
PDRB	0.002351	0.000705	3.334904	0.0010
UMR	0.030888	0.015739	1.962475	0.0513
PMA	0.000310	0.000102	3.042461	0.0027
PMDN	-0.000137	0.000666	-0.205838	0.8372
Belanja Pemerintah	-0,0000013	0,00000145	-0.894477	0,3725

Dummy	-764.3570	5213.074	-0.146623	0.8836
R-squared	0.995032			
F-statistic	846.2487			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: olah data menggunakan Eviews 12

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Variansi dari variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen diukur melalui Koefisien Determinasi (R^2). Penelitian ini berfokus untuk memahami sejauh mana variabel Produk Domestik Bruto (PDRB), Upah Minimum, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat menjelaskan variasi karakteristik penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil regresi model fixed effect, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.995032 yang menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu PDRB, UMR, PMA, PMDN, dan Belanja Pemerintah mampu menjelaskan 99,50% variansi variabel dependen, yaitu penyerapan tenaga kerja. Sementara itu sisanya sebesar 0,50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.

4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Untuk menilai apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen, dilakukan uji kelayakan model. Dengan F-statistik sebesar 846.2487 dan probabilitas sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari alpha 0,01, dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk PDRB, UMR, PMA, PMDN, dan Belanja Pemerintah.

4.5.3 Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji T)

Uji ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas t-statistik dengan alpha 10%. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 10%, ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari alpha 10%, berarti tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel. Tabel 4.9 menyajikan hasil uji t untuk metode fixed effect.

Tabel 4. 9 Hasil Uji T

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Probabilitas	Alpha	Keterangan
PDRB	0.003191	3.334904	0.0005	0,01	Signifikan
UMR	0.019592	1.962475	0.0513	0,1	Signifikan
PMA	0.0003	3.042461	0.0027	0,01	Signifikan
PMDN	-0.000254	-0.205838	0.8372	0,1	Tidak Signifikan
Belanja Pemerintah	-0,0000013	-0.894477	0.18615	0,1	Tidak Signifikan
Dummy	1578.181	-0.146623	0.8836	0,1	Tidak Signifikan

Sumber: olah data menggunakan Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.5.3.1 Uji t-statistik variabel PDRB (X1)

Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki koefisien positif sebesar 0,003191 dan probabilitas sebesar 0,0005 yang lebih kecil dari alpha 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dan signifikansinya.

4.5.3.2 Uji t-statistik variabel UMR (X2)

Berdasarkan hasil regresi di atas, koefisien untuk variabel UMR adalah positif sebesar 0.019592 dengan probabilitas 0.0513, yang lebih kecil dari alpha 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel UMR signifikan, yang berarti UMR memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

4.5.3.3 Uji t-statistik variabel PMA (X3)

Berdasarkan hasil regresi di atas, koefisien untuk variabel PMA adalah positif sebesar 0.0003 dengan probabilitas 0.0027, yang lebih kecil dari alpha 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PMA signifikan, yang berarti PMA memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

4.5.3.4 Uji t-statistik variabel PMDN (X4)

Berdasarkan hasil regresi di atas, koefisien untuk variabel PMDN adalah negatif sebesar -0.000254 dengan probabilitas 0.8372 lebih besar dari alpha 0,1% sehingga menunjukkan bahwa variabel PMDN tidak signifikan, artinya variabel PMDN tidak berpengaruh dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah

4.5.3.5 Uji t-statistik variabel belanja pemerintah (X5)

Berdasarkan hasil regresi di atas, koefisien untuk variabel Belanja Pemerintah adalah negatif sebesar -0,0000013 dengan probabilitas 0.18615 lebih besar dari alpha 0,1% sehingga menunjukkan bahwa variabel Belanja Pemerintah tidak signifikan, artinya variabel Belanja Pemerintah tidak berpengaruh dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

4.5.3.6 Uji t-statistik variabel Dummy (Covid-19)

Koefisien Dummy bernilai positif sebesar 1578,181 dengan probabilitas sebesar 0,8836, yang lebih besar dari alpha 10%, berdasarkan hasil regresi di atas. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dummy tidak signifikan, yang berarti tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

4.6 Pembahasan Hasil

4.6.1 Analisis Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Uji Efek Tetap (Fixed Effect) menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di daerah dan kota di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan koefisien sebesar 0,002351, maka probabilitas 0,0005 lebih kecil dari (0,01). Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja akan meningkat setiap kali terjadi kenaikan PDRB sebesar satu persen didukung oleh hasil regresi tersebut. Kebutuhan tenaga kerja meningkat seiring dengan peningkatan volume produksi karena produk regional bruto (PDRB) suatu daerah meningkat, sehingga memberikan tambahan kesempatan kerja bagi masyarakat. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hafiz et al. (2021) yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. PDRB juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan peningkatan sebesar 0,445 persen menurut penelitian Junrillah et al. (2021)

4.6.2 Analisis Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari pengujian model Fixed Effect diketahui bahwa Upah Minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai probabilitas sebesar 0,0513 lebih kecil dari (0,1). Penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Hermawan et al., 2019) yang menemukan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Menurut teori yang dikemukakan oleh Soni Sumarsono (2003), permintaan tenaga kerja akan menurun apabila tingkat upah meningkat, yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan teori tersebut, karena ditemukan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Di Provinsi Jawa Tengah, peningkatan upah

minimum justru mendorong peningkatan konsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan masyarakat. Peningkatan permintaan ini memaksa pengusaha untuk menambah produksi, yang akhirnya menyebabkan mereka merekrut lebih banyak tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan pasar dan memaksimalkan keuntungan.

4.6.3 Analisis Pengaruh PMA terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil Uji Fixed Effect Model, Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai probabilitas sebesar 0,005032 yang berarti lebih kecil atau sama dengan (0,01). Kapasitas perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dapat ditingkatkan melalui perolehan barang produksi oleh penanaman modal asing. Hal ini memberikan kontribusi terhadap perluasan ekonomi, menaikkan pendapatan daerah, dan membawa pengetahuan teknologi baru dari negara maju ke negara berkembang. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah diuntungkan oleh penanaman modal asing. Berdasarkan penelitian Jurusan et al. (2023), variabel Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan penjelasan di atas. Dengan kata lain, penyerapan tenaga kerja Provinsi Kalimantan Timur akan meningkat sebagai akibat dari peningkatan investasi.

4.6.4 Analisis Pengaruh PMDN terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari pengujian model Fixed Effect menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar -0.000121, pengaruh negatif dari penanaman modal dalam negeri ini mengindikasikan bahwa investasi di Provinsi Jawa Tengah belum efektif dalam meningkatkan kesempatan kerja. Dari penjelasan diatas, hasil ini sejalan dengan penelitian Kenraraswati et al. (2019) yang menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing Dalam Negeri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

4.6.5 Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil model Fixed Effect, dapat diketahui bahwa koefisien Belanja Pemerintah memiliki nilai -0,0000135 dan probabilitas 0,54. Artinya Belanja Pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Namun, temuan ini konsisten dengan penelitian Ni Putu Ambar Pratiwi dan Gusti Bagus Indrajaya (2019) yang menunjukkan bahwa pendidikan publik memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap pendidikan publik di Provinsi Bali.

4.6.6 Analisis Pengaruh Dummy (Covid 19) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pada pertengahan Maret 2020, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan ibadah. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap kemunculan kasus pertama wabah Covid-19 di Indonesia. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis

baru coronavirus, yang menular dengan menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan kemudian menyebar ke hampir seluruh negara. Wabah Covid-19 telah menyebabkan krisis ekonomi di beberapa negara. Berdasarkan tabel 4.9 diatas menjelaskan bahwa Dummy (Covid 19) tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian Larasati et al. (2021) yang menyatakan bahwa Covid 19 tidak berpengaruh terhadap kondisi penyerapan tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini mengkaji “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022”. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017-2022.
2. Upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017-2022.
3. Penanaman Modal Asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017-2022.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017-2022.
5. Belanja Pemerintah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017-2022.
6. Dummy (Covid 19) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017-2022.

5.2 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan merujuk pada hasil serta pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022” penelitian ini menghasilkan implikasi sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seharusnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada suatu daerah. Ketika PDRB meningkat, artinya terdapat peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Hal ini akan diikuti oleh ekspansi sektor-sektor ekonomi seperti industri, jasa, dan perdagangan, yang memerlukan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan produksi. Pada Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa kenaikan PDRB akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, dimana sektor-sektor ekonomi yang berkembang akan membuka lebih banyak kesempatan kerja.

2. Penetapan upah minimum yang tepat dapat menciptakan keseimbangan antara daya beli pekerja dan biaya tenaga bagi perusahaan. Kenaikan upah minimum yang terukur dan berdasarkan kondisi ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong produktivitas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu.
3. Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan bahwa investasi asing dapat menjadi pendorong penciptaan lapangan kerja. Peran pemerintah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui PMA dapat dioptimalkan dengan pengembangan sumber daya manusia yang efektif, dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang dihasilkan oleh investasi asing.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru. Investasi domestik yang diarahkan pada sektor-sektor produktif, seperti industri manufaktur, pertanian, dan jasa dapat secara langsung memerlukan tenaga kerja tambahan untuk operasionalnya. Namun, PMDN di Provinsi Jawa Tengah tidak diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan adanya upah yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan domestik belum mampu menawarkan kompensasi partisipasi tenaga kerja lokal, terutama di sektor-sektor yang memerlukan keterampilan dan keahlian khusus. Pemerintah dapat mereformasi kebijakan ketenagakerjaan untuk mendorong peningkatan upah yang sesuai dengan produktivitas tenaga kerja. Kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasional dan pengembangan kapasitas dapat meningkatkan daya tawar tenaga kerja dan akan mendorong perusahaan untuk menawarkan upah yang lebih kompetitif. Peningkatan keterampilan kerja juga akan memaksimalkan dampak investasi domestik terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor industri yang lebih kompleks dan berorientasi pada teknologi.
5. Rendahnya pengaruh belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja dapat terjadi karena alokasi belanja lebih banyak diarahkan pada sektor-sektor yang tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja, seperti belanja modal untuk infrastruktur atau belanja rutin yang tidak berfokus pada sektor padat karya. Belanja pemerintah yang lebih besar pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta

pengembangan UMKM, dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Selain itu, program padat karya atau proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja secara langsung dapat lebih dioptimalkan untuk meningkatkan efek terhadap pasar tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Chusna Arifatul. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Feriyanto. (2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Prespektif Indonesia. UPP STIM YKPN.
- Hafiz, dkk. (2021a). Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, (Vol. 1, No. 1). <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.174>
- Hafiz, dkk. (2021b). Pengaruh PDRB, UMK, IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, (Vol. 1, No. 1). <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.174>
- Hermawan, dkk. (2019). Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2017. *DINAMIC : Directory Journal of Economic* , 1(2).
- Insana, dkk. (2021). Dampak Upah, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Takalar. *Bulletin of Economics Studies (BEST)*, (Vol. 1, No. 1).
- Izzah, dkk. Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, ISSN Online*, (Vol. 5, No. 2).
- Julia Dwi Budiasih, & Kiky Asmara. (2024). Pengaruh Pendidikan, UMK, dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2021. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, (Vol. 10, No. 2). <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2054>
- Junrillah, dkk. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Upah Minimum Provinsi dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian Kabupaten Batanghari. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* (Vol. 10, No. 3).
- Jurusan, dkk. (2014). Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, (Vol. 7, No. 2).

- Kenraraswati, dkk. (2019). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Upah Minimum dan Belanja Modal Terhadap Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika (Vol. 14, No 1)*.
- Larasati, dkk. (2021). Analisis Perbedaan Sektor Ekonomi Kreatif dan Kontribusinya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kota Surabaya (Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19). *PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (Vol. 4, N0. 1)*.
- Ni Putu Ambar Pratiwi, & Gusti Bagus Indrajaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonom, (Vol. 24, No. 2)*.
- Permatasari, D. I., Ramadhona, F., & Lubis, A. (2023). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021. *Journal of Ecotourism and Rural Planning*. <https://economics.pubmedia.id/index.php/jerp>
- Pramono, K. D., & Firdayetti. (2020). Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti, (Vol. 2, No. 2)*. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14436>
- Puspita, dkk. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Matematika Dan Pendidikan Matematika (JMP), 13(2)*.
- Rakhmawati, dkk. (2018). Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Ekonomi (Vol. 2)*.
- Ridwan Fajar Hidayat. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2020. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 19(2)*. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.887>
- Widarjono Agus. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews. UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

Lampira 1. 1 Data Jumlah Tenaga Kerja, Nilai PDRB, UMR, Jumlah PMA, Jumlah PMDN, Total Belanja Pemerintah dan Variabel Dummy

Kabupaten/Kota	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	X5	dummy
Kabupaten Cilacap	2017	788414	95254586.7	1695000	78984.15	395274.4	3265399685	0
Kabupaten Cilacap	2018	747050	98100568.17	1840000	132493.72	4805118.2	3260826229	0
Kabupaten Cilacap	2019	788073	100327298.9	1990000	235385.50	6830889.7	3584962084	0
Kabupaten Cilacap	2020	807407	90011584.1	2160000	34645.14	4285260.1	3219631963	1
Kabupaten Cilacap	2021	747329	91944587.54	2228000	45341.13	1554233.1	3329814717	1
Kabupaten Cilacap	2022	788513	96677843.01	2230000	231974.11	622736.6	3402035621	1
Kabupaten Banyumas	2017	785231	35147313.3	1461500	67175.08	441641.7	3610994724	0
Kabupaten Banyumas	2018	835296	37414500.58	1589000	11023.92	614635.3	3319060759	0
Kabupaten Banyumas	2019	839941	39779320.86	1750000	2481.24	461612.5	3725271325	0
Kabupaten Banyumas	2020	824866	39121623.57	1900000	2878.12	1075029.7	3773568764	1
Kabupaten Banyumas	2021	813592	40686808.02	1970000	63669.91	996393.8	3430884286	1
Kabupaten Banyumas	2022	817989	43069504.38	1984000	180288.88	859956	3600847367	1
Kabupaten Purbalingga	2017	463809	15612285.9	1522500	491070.68	45765.3	2149247852	0
Kabupaten Purbalingga	2018	462740	16458708.49	1655200	176129.07	9103.8	1924908432	0
Kabupaten Purbalingga	2019	458799	17387610.58	1788500	2892.19	52876.3	2201807611	0
Kabupaten Purbalingga	2020	469748	17182873.71	1940800	7623.06	137433.3	2149247852	1
Kabupaten Purbalingga	2021	473232	17731438	1988000	250033.57	569164	1924908432	1
Kabupaten Purbalingga	2022	510319	18690729.01	1997000	4938598.82	264394.4	2201807611	1
Kabupaten Banjarnegara	2017	464432	13663266.65	1370000	14974.39	50645.3	2363699723	0
Kabupaten Banjarnegara	2018	482388	14438149.74	1490000	329.22	148609.1	2119096683	0
Kabupaten Banjarnegara	2019	471811	15246865.65	1610000	1002.66	168026.9	2222941415	0
Kabupaten Banjarnegara	2020	466173	15045884.99	1748000	943.32	68582.9	2259878404	1
Kabupaten Banjarnegara	2021	470460	15536477.91	1805000	14413.28	114381.1	2042019297	1
Kabupaten Banjarnegara	2022	487714	16359106.4	1820000	685577.17	495261.1	2039210930	1
Kabupaten Kebumen	2017	560548	17794789.3	1445000	0.00	17065	2875505804	0
Kabupaten Kebumen	2018	558741	18778048.5	1573000	0.00	71422.6	2652055178	0
Kabupaten Kebumen	2019	592558	19815062.62	1700000	0.00	78430.3	3021687363	0
Kabupaten Kebumen	2020	595203	19527664.95	1845000	0.00	39135.2	3044056768	1
Kabupaten Kebumen	2021	582719	20253059.43	1905500	0.00	106714.6	2779840698	1
Kabupaten Kebumen	2022	619368	21425793.42	1912000	0.00	135572.3	2824358294	1
Kabupaten Purworejo	2017	342433	12023780.44	1431000	10686.33	13941.7	2454019486	0
Kabupaten Purworejo	2018	356210	12664976.05	1560000	0.00	113205	2255674841	0
Kabupaten Purworejo	2019	363608	13353336.33	1686000	211.83	18337.1	2282729436	0
Kabupaten Purworejo	2020	378951	13138294.11	1835000	645.88	71488.9	2483287920	1
Kabupaten Purworejo	2021	400401	13573469.54	1895000	1530.03	44815.3	2135478214	1
Kabupaten Purworejo	2022	393775	14300556.84	1907000	57739.45	67572	2347131165	1
Kabupaten Wonosobo	2017	404533	12436048.84	1457100	10726.91	1688.5	2007985225	0
Kabupaten Wonosobo	2018	413837	13065841.64	1585000	21.38	16125.3	1856167370	0
Kabupaten Wonosobo	2019	415203	13793040.27	1712500	4.24	14715	2214052791	0
Kabupaten Wonosobo	2020	405187	13566176.25	1859000	7.08	9280.4	2070280635	1
Kabupaten Wonosobo	2021	405526	14064764.7	1920000	1530.03	226642.1	1860097991	1
Kabupaten Wonosobo	2022	431010	14770503.78	1932000	942783.97	92517.5	2011113250	1
Kabupaten Magelang	2017	704651	20974801.01	1570000	33722.81	185031.7	2738920009	0
Kabupaten Magelang	2018	685452	22082795.9	1742000	38950.72	125480.3	2486540561	0
Kabupaten Magelang	2019	723889	23253154.32	1882000	615.72	193883.8	2797624801	0
Kabupaten Magelang	2020	741284	22865151.84	2042200	886.67	197252.5	2719200678	1
Kabupaten Magelang	2021	735613	23661713.24	2075000	3675.80	309145	2413163789	1
Kabupaten Magelang	2022	781195	24953184.97	2082000	165515.17	892603.6	2570326002	1
Kabupaten Boyolali	2017	504684	20248849.44	1520000	178475.24	474463.2	2329840181	0
Kabupaten Boyolali	2018	537392	21406268.93	1652000	217531.13	11113601.2	2203112762	0
Kabupaten Boyolali	2019	539778	22681097.81	1790000	115931.73	422073.6	2513981310	0
Kabupaten Boyolali	2020	549582	22409732.64	1942500	73543.74	709545	2480627139	1
Kabupaten Boyolali	2021	559932	23447366.01	2000000	370247.12	1047750.5	2268508827	1
Kabupaten Boyolali	2022	562948	24931304.74	2010500	12282758.15	1518219.5	2471827429	1
Kabupaten Klaten	2017	586684	24993103.27	1528500	138746.44	247327.2	2956483629	0
Kabupaten Klaten	2018	602911	26360649.93	1662000	44058.63	229788.5	2973118685	0
Kabupaten Klaten	2019	621855	27805993.69	1796000	45362.69	212273.4	3084765732	0
Kabupaten Klaten	2020	606253	27480359.39	1948000	31223.12	43751.7	2907327298	1
Kabupaten Klaten	2021	596661	28531108.64	2011500	340025.44	110407.8	2493406882	1
Kabupaten Klaten	2022	623119	30214981.96	2016000	6481186.52	1081215.8	2527619332	1
Kabupaten Sukoharjo	2017	450280	24163939.48	1513000	351823.74	2055377.8	2443424991	0
Kabupaten Sukoharjo	2018	463512	25564065.09	1648000	765073.01	1107151.3	2050161905	0
Kabupaten Sukoharjo	2019	465395	27076442.63	1783500	68647.04	921677.9	2143687570	0
Kabupaten Sukoharjo	2020	454419	26616503.11	1938000	77232.04	439117.3	2401529962	1
Kabupaten Sukoharjo	2021	476867	27634117.53	1986450	33014.77	861519.3	2089455559	1
Kabupaten Sukoharjo	2022	475594	29185353.81	1998500	3656290.13	167093.1	2042027815	1

Kabupaten Wonogiri	2017	531570	18818939.39	1401000	88642.43	41831.9	2533571009	0
Kabupaten Wonogiri	2018	567194	19837022.48	1542000	1734.47	42569.2	2246861249	0
Kabupaten Wonogiri	2019	528362	20856209.49	1655000	15559.62	58524.9	2685943446	0
Kabupaten Wonogiri	2020	557865	20563144.42	1797000	74676.86	41716.5	2477910262	1
Kabupaten Wonogiri	2021	559093	21251165.24	1827000	59168.81	341596.2	2297510694	1
Kabupaten Wonogiri	2022	578089	22448630.49	1839500	1415001.00	207345.8	2243214085	1
Kabupaten Karanganyar	2017	457277	23731952.05	1560000	12580.11	1957677.3	2267508229	0
Kabupaten Karanganyar	2018	471327	25150277.73	1696000	107207.82	989035.4	2064581558	0
Kabupaten Karanganyar	2019	470938	26599744.09	1833000	194202.92	261021.8	2469462923	0
Kabupaten Karanganyar	2020	484423	26103228.36	1989000	141132.93	181965.3	2346436745	1
Kabupaten Karanganyar	2021	487270	27039607.96	2054000	4284172.43	936568.3	2138939585	1
Kabupaten Karanganyar	2022	476875	28624989.89	2064500	3497303.48	898890.9	2203430151	1
Kabupaten Sragen	2017	466610	23977207.3	1422500	22049.01	999424.6	2393856680	0
Kabupaten Sragen	2018	444963	25356459.51	1546500	72769.29	2441479	2236802757	0
Kabupaten Sragen	2019	458123	26853059.12	1673500	24843.42	33837.4	2578755182	0
Kabupaten Sragen	2020	458856	26367261.24	1816000	83798.47	117734.8	2422886893	1
Kabupaten Sragen	2021	483592	27355145.96	1829500	45349.74	617771.9	2160877776	1
Kabupaten Sragen	2022	470456	28929808.57	1839500	1118758.12	773266.5	2306325555	1
Kabupaten Grobogan	2017	724515	17659254.29	1435000	258757.98	247327.2	2724196340	0
Kabupaten Grobogan	2018	727216	18688571.17	1560000	609305.78	215708.8	2345537047	0
Kabupaten Grobogan	2019	707352	19692631.32	1685500	291108.08	393135.8	2746493935	0
Kabupaten Grobogan	2020	710909	19383027.4	1830000	206436.05	3492706.6	2680645523	1
Kabupaten Grobogan	2021	748718	20115533.52	1890000	237358.43	4137736	2428631674	1
Kabupaten Grobogan	2022	744832	21318155.49	1894000	3997327.96	517607.1	2687129832	1
Kabupaten Blora	2017	455270	16866640.78	1438000	85788.23	100356	2057569590	0
Kabupaten Blora	2018	476870	17605216	1564000	60355.79	13246.2	2116475561	0
Kabupaten Blora	2019	448354	18318415.14	1690000	2923.25	2561.8	2322382566	0
Kabupaten Blora	2020	468013	17483886.74	1834000	1888.06	282232.4	2012812302	1
Kabupaten Blora	2021	467018	18126446.9	1894000	930.07	75106.9	2113773066	1
Kabupaten Blora	2022	500373	18608610.39	1904000	5466.72	74495.7	2396215622	1
Kabupaten Rembang	2017	335518	12220172.17	1408000	61114.99	74039	1954478076	0
Kabupaten Rembang	2018	327357	12939682.29	1535000	237200.31	427814.8	1814662872	0
Kabupaten Rembang	2019	321091	13612335.1	1660000	122560.60	242943.5	1975181553	0
Kabupaten Rembang	2020	314797	13409631.2	1802000	7050.84	237572.5	2054302198	1
Kabupaten Rembang	2021	348727	13925516.24	1861000	385761.28	154593.7	1836443012	1
Kabupaten Rembang	2022	375614	14698843.95	1875000	3012390.85	765401.9	1991790018	1
Kabupaten Pati	2017	623407	27612445.94	1420500	53810.41	889755.5	2926635091	0
Kabupaten Pati	2018	633341	29189879.34	1585000	2331.63	106167.7	2725893398	0
Kabupaten Pati	2019	631250	30885378.59	1742000	85484.70	221462.4	3091474682	0
Kabupaten Pati	2020	607706	30527473.16	1891000	182297.76	176431.6	2910220672	1
Kabupaten Pati	2021	662492	31559078.68	1953000	659438.54	222494.1	2623732654	1
Kabupaten Pati	2022	692477	33312381.3	1968500	22981947.61	188886.3	2717685027	1
Kabupaten Kudus	2017	453121	68821162.19	1741000	33289.95	1034981.2	2165286082	0
Kabupaten Kudus	2018	468131	71048973.31	1892500	1624.73	687187.7	1957701653	0
Kabupaten Kudus	2019	470169	73241777.45	2044500	11989.58	2041677.3	2260081505	0
Kabupaten Kudus	2020	483983	70964725.44	2218500	27102.81	1919450.4	1911471464	1
Kabupaten Kudus	2021	501443	69872178.14	2291000	11440.78	720573.1	1879122990	1
Kabupaten Kudus	2022	485048	71416927.09	2293000	1700783.15	583677	2231500774	1
Kabupaten Jepara	2017	609391	19055335.81	1600000	14104954.60	56968	2394848154	0
Kabupaten Jepara	2018	624774	20170255.17	1740000	13051800.60	83651	2300574122	0
Kabupaten Jepara	2019	635258	21384282.93	1880000	20256247.99	17620.7	2528382702	0
Kabupaten Jepara	2020	634386	20973089.31	2040000	5253834.11	34311.7	2399062011	1
Kabupaten Jepara	2021	658208	21944232.37	2107000	5417740.79	149830.7	2309409464	1
Kabupaten Jepara	2022	671473	23249852.94	2108500	148361889.48	160736.9	2429312218	1
Kabupaten Demak	2017	549295	16584124.32	1900000	213510.17	758548.7	2127827629	0
Kabupaten Demak	2018	571560	17479877.38	2065500	305876.42	463882.8	2050065954	0
Kabupaten Demak	2019	561895	18417009.99	2240000	122234.38	517438.8	2562454775	0
Kabupaten Demak	2020	574602	18374561.64	2432000	206849.64	962320.9	2400405766	1
Kabupaten Demak	2021	563708	18856415.63	2511500	55459.99	2569159.4	2336015726	1
Kabupaten Demak	2022	571566	19846430.87	2513000	9479055.85	2495472.8	2487342627	1
Kabupaten Semarang	2017	596297	32002984.99	1745000	334482.13	1339475.7	2287457579	0
Kabupaten Semarang	2018	575925	33817679.34	1900000	268653.05	2141898.6	2171799811	0
Kabupaten Semarang	2019	600787	35638961.98	2055000	330231.67	545448.3	2492255493	0
Kabupaten Semarang	2020	600322	34688037.34	2230000	54470.49	575108.6	2457006194	1
Kabupaten Semarang	2021	598413	35948862.04	2303000	47571.58	633558.7	2198880662	1
Kabupaten Semarang	2022	619227	37857918.7	2311500	30506621.72	11566299.6	2536331344	1
Kabupaten Temanggung	2017	421481	13776254.81	1431500	0.00	165803.8	1902481151	0
Kabupaten Temanggung	2018	426394	14483255.21	1557000	129599.14	93391	1670309283	0
Kabupaten Temanggung	2019	444788	15214058.87	1682500	2763.68	7581.9	1969512901	0
Kabupaten Temanggung	2020	343400	14890755.46	1825500	5583.45	33142	1996489275	1
Kabupaten Temanggung	2021	443009	15387930.44	1885000	961774.44	99001.4	1877969167	1
Kabupaten Temanggung	2022	460765	16187374.83	1888000	5328384.75	141770.7	1958748410	1

Kabupaten Kendal	2017	460967	27649777.07	1775000	94661.95	4566.1	2344630645	0
Kabupaten Kendal	2018	462260	29245664.52	1930000	862030.79	311708.4	2148450040	0
Kabupaten Kendal	2019	476852	30916386.47	2085000	264457.05	135930.5	2440873249	0
Kabupaten Kendal	2020	493062	30449024.4	2262000	932175.33	201109.1	2451834514	1
Kabupaten Kendal	2021	493732	31632276.02	2336000	3194809.87	560723	2069958007	1
Kabupaten Kendal	2022	524396	33428957.44	2340500	72564209.54	585981.4	2499014019	1
Kabupaten Batang	2017	365710	13667079.8	1603000	5835304.31	321422.8	1669850566	0
Kabupaten Batang	2018	393192	14448625.81	1750000	14393024.97	544148.6	1687193466	0
Kabupaten Batang	2019	389319	15226786.53	1900000	13620149.31	240595.5	1919265838	0
Kabupaten Batang	2020	387741	15031083.84	2062000	8684656.60	253422.5	1925617426	1
Kabupaten Batang	2021	402320	15764265.54	2129500	4284172.43	3202162	1780425132	1
Kabupaten Batang	2022	426004	16704986.75	2135500	74565301.89	1142111.1	1801913436	1
Kabupaten Pekalongan	2017	441290	14679128.72	1584000	0.00	5907349.9	2272114708	0
Kabupaten Pekalongan	2018	447271	15525050.94	1721500	0.00	1241009.1	2160744430	0
Kabupaten Pekalongan	2019	454776	16356350.99	1860000	0.00	40784.4	2353391384	0
Kabupaten Pekalongan	2020	446922	16047511.77	2018500	0.00	76392.8	2446656142	1
Kabupaten Pekalongan	2021	465460	16615065.65	2084500	339126.94	478072.6	2075043160	1
Kabupaten Pekalongan	2022	467510	17463415.8	2095000	38402.61	202730.7	2123953846	1
Kabupaten Pemalang	2017	587819	16336984	1460000	15474.89	2033.3	2519780578	0
Kabupaten Pemalang	2018	589715	17265888.82	1588000	16419.73	103357.8	2324288798	0
Kabupaten Pemalang	2019	600325	18267199.78	1718000	31593.74	51606.5	2948441837	0
Kabupaten Pemalang	2020	589786	18155597.42	1865000	14719.23	110094.8	2836842885	1
Kabupaten Pemalang	2021	601815	18933194.65	1926000	961774.44	175273.7	2524558785	1
Kabupaten Pemalang	2022	642038	19895235.2	1941000	4686224.17	630479.4	2504262139	1
Kabupaten Tegal	2017	645162	22322100.13	1487000	1425894.60	404467.7	2583870631	0
Kabupaten Tegal	2018	637974	23552548.37	1671000	190859.93	59570.2	2575620503	0
Kabupaten Tegal	2019	653366	24861495.83	1747000	191809.24	40784.4	2815712481	0
Kabupaten Tegal	2020	644978	24492624.83	1896000	137429.04	7577239.2	2905805253	1
Kabupaten Tegal	2021	644499	25401911.06	1958000	869021.04	157467.2	2776664042	1
Kabupaten Tegal	2022	643030	26705267.25	1968500	14728934.45	565738.4	2722064918	1
Kabupaten Brebes	2017	823661	29509206.81	1418500	357329.23	62908.2	2949813932	0
Kabupaten Brebes	2018	840343	31060106.12	1542000	1299818.03	67550.8	2825364002	0
Kabupaten Brebes	2019	830601	32847862.67	1666000	420331.44	44044.3	3308888412	0
Kabupaten Brebes	2020	821061	32693080.65	1807500	1287442.45	34026.1	3293494179	1
Kabupaten Brebes	2021	793289	33533328.43	1866500	482712.92	514789.8	3126226471	1
Kabupaten Brebes	2022	826023	35414209.35	1885000	21579305.66	266600.2	3091285560	1
Kota Magelang	2017	58582	5820532	1453000	108337.74	16418900	1074568603	0
Kota Magelang	2018	63698	6138622.75	1580000	829.47	12966.2	937345746	0
Kota Magelang	2019	60649	6470539.51	1707000	9779.49	25080.2	1102207518	0
Kota Magelang	2020	60612	6312054.41	1853000	16979.80	30106.3	1006107354	1
Kota Magelang	2021	60317	6513894.68	1914000	1683.61	289066.1	9350477340	1
Kota Magelang	2022	62347	6889452.53	1934000	68966.65	116714.9	1039501503	1
Kota Surakarta	2017	259394	31685480.46	1535000	45031.38	29262.3	2034646875	0
Kota Surakarta	2018	262190	33505900.66	1668500	1274.13	383298.8	1914818394	0
Kota Surakarta	2019	277230	35441107.67	1802500	8937.81	212674.8	2134614681	0
Kota Surakarta	2020	266082	34815965.32	1956500	32326.50	391912.5	1624395242	1
Kota Surakarta	2021	260025	36211248.26	2014000	23699.67	153236.4	1866496348	1
Kota Surakarta	2022	271928	38475988.36	2035500	1341086.95	450421.7	2088323396	1
Kota Salatiga	2017	100834	8624240.98	1597000	430456.19	98595.9	1146473973	0
Kota Salatiga	2018	105114	9127857.77	1736000	137949.38	121931.2	923538238	0
Kota Salatiga	2019	99041	9666446.31	1875500	218916.42	25250.3	1186330070	0
Kota Salatiga	2020	102053	9503711.49	2035000	163830.74	91667.3	1006404906	1
Kota Salatiga	2021	103979	9821995.68	2101500	1200354.31	92595.4	9565013045	1
Kota Salatiga	2022	108396	10365438.08	2128500	4551183.47	101195.1	932071471	1
Kota Semarang	2017	899796	123279891.91	2125000	2713353.88	1129039.2	4782714421	0
Kota Semarang	2018	883396	131266362.57	2310000	655757.32	8534747.9	4506407630	0
Kota Semarang	2019	919003	140199517.36	2498500	1724635.13	4048092.1	4776442687	0
Kota Semarang	2020	925963	137601979.91	2715000	1568684.25	6633894.6	5319832790	1
Kota Semarang	2021	936076	144704571.51	2810000	1496429.43	8483055.5	4764045946	1
Kota Semarang	2022	994091	152995411.88	2835000	7520192.99	5096829.9	4871946697	1
Kota Pekalongan	2017	149487	6706278.7	1623500	0.00	51256.5	1012635662	0
Kota Pekalongan	2018	152977	7087915.58	1765000	8508.44	96123	883184895	0
Kota Pekalongan	2019	159758	7477425.04	1906500	128.51	24335.2	1063652853	0
Kota Pekalongan	2020	146219	7337833.89	2072000	999.98	26998.6	1060107482	1
Kota Pekalongan	2021	168725	7601486.23	2139500	7631.49	410594.8	962091792	1
Kota Pekalongan	2022	161470	8039459.94	2156500	509196.08	69178.4	1031090188	1
Kota Tegal	2017	114521	10006943	1499500	2218.43	34326.6	1137698108	0
Kota Tegal	2018	115158	10594340.17	1630500	15225.41	13494.7	916730789	0
Kota Tegal	2019	122720	11205782.88	1762000	34387.07	34483.8	1202471927	0
Kota Tegal	2020	114121	10949122.06	1925000	528.32	47697.1	1298031100	1
Kota Tegal	2021	121510	11290268.87	1982500	13816.20	199990.3	1089705697	1
Kota Tegal	2022	124887	11873200.89	2006000	628892.90	101932.3	1127738113	1

Lampiran 1. 2 Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	553343.1	112718.6	4.909068	0.0000
X1	0.004559	0.000630	7.234538	0.0000
X2	-0.183940	0.069081	-2.662686	0.0084
X3	0.001807	0.000856	2.110207	0.0361
X4	-0.003534	0.005812	-0.608023	0.5439
X5	5.67E-05	1.22E-05	4.638502	0.0000
DUMMY	53616.52	31302.20	1.712867	0.0883
R-squared	0.422087	Mean dependent var		504603.0
Adjusted R-squared	0.405006	S.D. dependent var		202712.2
S.E. of regression	156363.8	Akaike info criterion		26.79052
Sum squared resid	4.96E+12	Schwarz criterion		26.90209
Log likelihood	-2806.005	Hannan-Quinn criter.		26.83563
F-statistic	24.71064	Durbin-Watson stat		0.284535
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 1. 3 Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	384690.6	22271.81	17.27253	0.0000
X1	0.002351	0.000705	3.334904	0.0010
X2	0.030888	0.015739	1.962475	0.0513
X3	0.000310	0.000102	3.042461	0.0027
X4	-0.000137	0.000666	-0.205838	0.8372
X5	-1.30E-06	1.45E-06	-0.894477	0.3723
DUMMY	-764.3570	5213.074	-0.146623	0.8836
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.995032	Mean dependent var	504603.0	
Adjusted R-squared	0.993856	S.D. dependent var	202712.2	
S.E. of regression	15888.85	Akaike info criterion	22.35789	
Sum squared resid	4.27E+10	Schwarz criterion	23.01137	
Log likelihood	-2306.579	Hannan-Quinn criter.	22.62207	
F-statistic	846.2487	Durbin-Watson stat	2.140895	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 1. 4 Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	380483.2	31231.48	12.18268	0.0000
X1	0.003191	0.000565	5.647597	0.0000
X2	0.019592	0.014975	1.308327	0.1922
X3	0.000300	0.000102	2.948485	0.0036
X4	-0.000254	0.000664	-0.382248	0.7027
X5	-9.61E-07	1.45E-06	-0.664068	0.5074
DUMMY	1578.181	5125.342	0.307917	0.7585
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			131614.5	0.9856
Idiosyncratic random			15888.85	0.0144
Weighted Statistics				
R-squared	0.340846	Mean dependent var		24839.13
Adjusted R-squared	0.321364	S.D. dependent var		20447.10
S.E. of regression	16844.20	Sum squared resid		5.76E+10
F-statistic	17.49510	Durbin-Watson stat		1.596356
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.295120	Mean dependent var		504603.0
Sum squared resid	6.05E+12	Durbin-Watson stat		0.015188

Lampiran 1. 5 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXED

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	573.264634	(34,169)	0.0000
Cross-section Chi-square	998.852936	34	0.0000

Lampiran 1. 6 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross- section	Time	Both
Breusch-Pagan	395.6802 0	1.711177 -0.1908	397.3914 0
Honda	19.89171 0	-1.30812 -0.9046	13.14058 0
King-Wu	19.89171 0	-1.30812 -0.9046	5.900985 0
Standardized Honda	20.80167 0	-0.83822 -0.799	10.89708 0
Standardized King- Wu	20.80167 0	-0.83822 -0.799	4.283698 0
Gourieroux, et al.	--	--	395.6802 0

Lampiran 1. 7 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.145357	6	0.0000